

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN  
BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**FITRIA  
NPM : 177110018**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Fitria  
NPM : 177110018  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan penulisan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

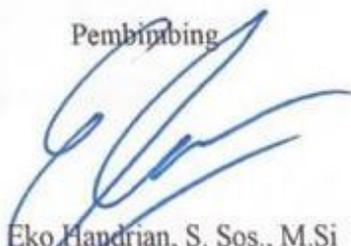
Turut Menyetujui:

Program Studi Administrasi Publik



Lilis Suriani, S. Sos., M.Si

Pembimbing



Eko Handrian, S. Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

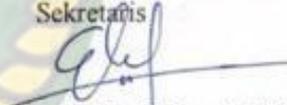
**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

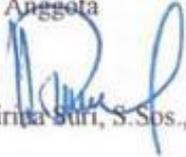
Nama : Fitria  
NPM : 177110018  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

  
Ketua  
Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 20 Agustus 2021  
Sekretaris

  
Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si  
Anggota

  
Dr. Dia Meirita Sari, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGSAHAN SKRIPSI

Nama : Fitria  
NPM : 177110018  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Pengesahan skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

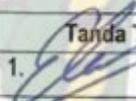
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

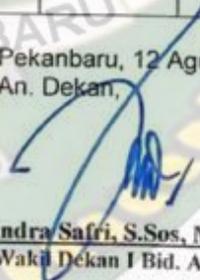
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1193/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 11 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 12 Agustus 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fitria  
NPM : 177110018  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Budaya Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : \* 70 \* ; Huruf : \* B \*  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Erna Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 12 Agustus 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1193/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : Fitria   |
| N P M              | : 177110018  |
| Program Studi      | : Administrasi Publik  |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1)  |
| Judul Skripsi      | : Implementasi Program Pengembangan Budidaya Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru |
- Struktur Tim :
- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Eko Handrian, S.Sos., M.Si     | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Andri Kurniawan, B.P.M., M.Si  | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2021  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk penguji-----

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayat-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan serta kekuatan sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru”**.

Kemudian tidak lupa pula sholawat beserta salam saya ucapkan untuk jujungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allhamumma Solli a'ala Syadidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasullulah. Yang telah memeberika suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai berkahnya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia hingga ke akhir zaman.

Dalam proses studi maupun proses melakukan penulisan dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan motivasi,dukungan, dan membantu penulis. Oleh karna itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.CI  
Karena penulis kuliah di Universitas Islam Riau ini, yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman.

2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suriani,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian,S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabra untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bias menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan ibu Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru khususnya Kepala Bidang Perikanan beserta Rekan-rekan yang telah memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mengajar, memberikan arahan, dan memberikan dorongan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Karyawan Tata Usaha beserta Staff yang telah membantu dalam surat-menyurat dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
8. Terkhususnya untuk Ayahnya alm.Nasib Saragih dan ibunya tercinta Rubini yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah dalam memberikan segi material penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi.

9. Kepada Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Administrasi Publik Kelas C angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penyusunan Skripsi ini.

Naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk membantu Skripsi Adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini kan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan Dapat menambah Khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca.

Pekanbaru, 13 Juli 2021  
Penulis

Ttd

Fitria

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II</b> .....	18
<b>STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi .....	18
2. Konsep New Public Service .....	21
3. Konsep Organisasi.....	22
4. Konsep Manajemen.....	24
5. Konsep Kebijakan .....	25
6. Konsep pengembangan .....	26
7. Konsep Sumber Daya Manusia .....	27

8. Konsep Implementasi .....	29
B. Kerangka Pikir.....	30
C. Konsep Operasional .....	31
D. Operasional Variabel.....	36
E. Teknik Pengukuran .....	37
1. Standar dan sasaran kebijakan.....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Teknik Penarikan Sampel.....	44
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46
I. Rencana Sistematis Laporan penelitian .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	49
B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	50
C. Visi dan Misi .....	51
D. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	51
E. Struktur Organisasi Dinas Pertaniann dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	60
<b>BAB V.....</b>	<b>61</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden .....	61
B. Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru. ....	65

C.Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	91
D. Faktor penghambat Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	96
<b>BAB VI.....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG .....</b>	<b>99</b>
<b>IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN .....</b>	<b>99</b>
<b>BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>99</b>
<b>KUESIONER PENELITIAN TENTANG .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR KUESIONER PENELITIAN TENTANG .....</b>	<b>107</b>
<b>IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN .....</b>	<b>107</b>
<b>BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>107</b>
<b>KUESIONER PENELITIAN TENTANG .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kerangka pemikiran peneliti tentang Implementasi Program Pengembangan Budaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	30
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1:	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP) Dikolam Pembesaran Tahun 2018,2019 .....	3
Tabel I. 2:	Standar Operasional Prosedur Program Pengembangan Dan Pengendalian Budidaya Ikan .....	5
Tabel I. 3 :	Nama-Nama Peserta Pelatihan Pemebenihan Ikan .....	9
Tabel I. 4:	Nama-Nama Peserta Pelatihan Budidaya Ikan untuk Pokdakan di Kecamatan Tampan.....	9
Tabel I. 5:	Nama-Nama Peserta Pelatihan Budidaya Lele untuk Pembudidaya Ikan di Kecamatan Rumbai Pesisir .....	10
Tabel I. 6:	Nama-Nama Peserta Temu Lapang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) .....	10
Tabel I. 7:	Nama-Nama Pokdakan Penerima Paket Pecontohan Budidaya Ikan Air di Kolam .....	11
Tabel I. 8:	Rincian SPKS Paket Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di Kolam.....	13
Tabel I. 9:	Jumlah Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan.....	15
Tabel II. 1:	Operasional Variabel Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. ....	36
Tabel III. 1:	Populasi dan Sampel Penelitian .....	43
Tabel III. 2:	Populasi dan Sampel Pembudidaya ikan Kota Pekanbaru.....	43
Tabel III. 3:	Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. ....	46
Tabel V. 1:	Identitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia .....	62
Tabel V. 2:	Identitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Tingkat Usia .....	62
Tabel V. 3:	Identitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Tabel V. 4:	Identitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
Tabel V. 5:	Identitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64

Tabel V. 6:	Identitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	65
Tabel V. 7:	Distribusi Tanggapan Responden Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan terhadap Impelementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru.....	66
Tabel V. 8:	Distribusi Tanggapan Responden Responden Masyarakat Pembudidaya mengenai Program Pengembangan budidaya ikan Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	69
Tabel V. 9:	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan.....	72
Tabel V. 10:	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	75
Tabel V. 11:	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	78
Tabel V. 12:	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	80
Tabel V. 13:	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	82
Tabel V. 14:	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	85
Tabel V. 15:	Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	87
Tabel V. 16:	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya ikan .....	90
Tabel V. 17:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas program Pengembangan budidaya ikan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	92
Tabel V. 18:	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat implementasi program Pengembangan budidaya ikan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	99
LAMPIRAN 2	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Seksi Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	106
LAMPIRAN 3	Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	107
LAMPIRAN 4	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Pembudidaya Kota Pekanbaru.....	114
LAMPIRAN 5	Daftar Telly Indikator Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan untuk dinas.....	115
LAMPIRAN 6	Daftar Telly Indikator Standar Dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan untuk masyarakat.....	120
LAMPIRAN 7	Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru .....	131
LAMPIRAN 8	Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	134
LAMPIRAN 9	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	135
LAMPIRAN 10	Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	136
LAMPIRAN 11	Surat Keterangan Bukti Penelitian Dari Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	137

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria  
NPM : 177110018  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan PerikananKota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode peneltian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Unversitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan bukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli2021  
Penulis

Ttd

Fitria

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA  
PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA  
PEKANBARU  
ABSTRAK**

Oleh  
Fitria

Kata kunci: Implementasi, Program, Pengembangan Budidaya Perikanan

Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan indikator penilaian yaitu: Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, masih sedikit belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Indikator Sumber Daya, Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran. Indikator Hubungan Antar Organisasi, Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat pembudidaya pada program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparaturnya menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, berakuntabilitas, akuntabilitas, berpartisipasi dan Responsibilitas, efektif dan efisien. Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparaturnya menilai hasil yang maksimal dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

# **IMPLEMENTATION OF FISHERIES CULTIVATION DEVELOPMENT PROGRAM AT THE AGRICULTURE AND FISHERIES DEPARTMENT OF PEKANBARU CITY**

## **ABSTRACT**

**By**

**Fitria**

**Keywords:** Implementation, Program, Aquaculture Development

This study was to determine the implementation of the Aquaculture Development Program at the Department of Agriculture and Fisheries of Pekanbaru City. This type of research uses quantitative descriptive. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Implementation of the Aquaculture Development Program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service was based on the assessment indicators, namely: Standard Indicators and Policy Targets, Fairly Implemented. This is because the aquaculture development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service has not run optimally, it is still slightly not in accordance with the objectives of the aquaculture development program implemented at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service. Resource Indicator, Simply Implemented. This is because they consider that they have run the aquaculture development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service in accordance with the Standard Operating Procedure or SOP so that it is right on target. Indicators of Inter-Organizational Relations, Simply Implemented. This is because the relationship between organizations in processing the aspirations and complaints of the cultivating community in the aquaculture development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service has been going well. Indicator Characteristics of Implementing Agent, Self Implemented. This is because the service apparatus considers that they have carried out their responsibilities with competence, accountability, accountability, participation and responsibility, effectively and efficiently. So they assess the characteristics of implementing agents that have met the requirements or have been implemented. Indicators of Social, Political and Economic Conditions, Moderately Implemented. This is because the apparatus assesses the maximum results in the aquaculture development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service which helps social, political and economic conditions become even better.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perikanan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian Indonesia. Ada berbentuk macam kegiatan di Indonesia salah satunya adalah budidaya perikanan yang mana kegiatan ini berlangsung untuk meningkatkan taraf kehidupan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan mempunyai potensi yang baik guna memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang mengacu Pada Peraturan Perundangan-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan”.

Program merupakan sebagai rancangan kegiatan selama satu periode atau satu tahun. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Pengembangan juga suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu alat atau cara merevisi itu yang telah ada menjadi baik. Selama kegiatan itu dilaksanakan dengan maksud mengadakan penyempurnaan yang akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup bagus untuk digunakan seterusnya maka selesai kegiatan pengembangan. Maka untuk kegiatan program pengembangan perlunya administrasi yang dimana untuk menjalankan program yang telah ada perlu administrasi yang artinya segala proses kerjasama

antara beberapa orang dan administrasi juga dikaitkan dengan kegiatan mencatat-mencatat, surat menyurat, dan sebagainya.

Untuk itu, Perkembangan budidaya adalah upaya untuk mengembangkan orang-orang dan meningkat jumlah orang yang ingin memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki dengan memberikan pengetahuan tentang budidaya pelaku pembudidaya perikanan.dalam perkembangan usahanya yang berkembang secara luas lahan dan berkembang dari segi budidaya maksudnya perkembangan dari segi usaha pembudidaya baik dalam bidang usaha maupun orangnya. Dapat dilihat dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat dikembangkan dengan alat tersebut dan memanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang perekonomian masyarakat.Maka dengan mengimplementasikan dan melalui dasar- dasar kebijakan yang dibuat oleh salah satunya terhadap Budidaya Perikanan melalui ketenagakerja budidaya Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 7 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, dan kekuasaan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> (63,226 Ha) yang terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan memiliki potensi budidaya kolam 650 Ha dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun2019 tercapai 33,04 % (214,76 Ha) , untuk potensi budidaya ikan dikeramba/jaring apung disungai dan waduk

mencapai 1.000 unit dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun 2019 baru mencapai 5,90% (67 unit).

Tabel I. 1: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP) Dikolam Pembesaran Tahun 2018,2019

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Tenayan Raya	824	825
2	Rumbai Pesisir	457	457
3	Rumbai	431	432
4	Bukit Raya	221	221
5	Marpoyan Damai	140	140
6	Tampan	410	410
7	Payung Sekaki	61	61
8	Lima Puluh	75	75
9	Sail	32	32
10	Sukajadi	6	6
Jumlah		2.657	2.659

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2019*

Dari tabel diatas, jumlah rumah tangga perikanan kolam pembesaran menurut dari perecamatan mengalami sedikit peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah RTP 2.657 sedangkan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah RTP 2.659 oleh karna itu kecamatan Tenayan Raya, Rumbai, dan Rumbai Pesisir merupakan kecamatan Pontesial, Hal ini dapat dilihat dari kedua data pada tahun terakhir bahwa pembudidaya yang mengikuti mengalami peningkatan.

Seperti tercantum dalam penyusunan RESTRA Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022: Bidang perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlunya merumuskan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan perUndang-Undang terhadap program/kegiatan yang dibuat berdasarkan anggaran yang

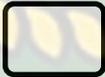
diberikan dengan berkejasama antar pegawai guna mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang perikanan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas baik dalam sarana dan prasarana budidaya perikanan.dengan menyusun norma, standart, prosedur dan kiteria di bidang perikanan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan serta pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Tidak hanya tugas dan fungsi bidang perikanan saja namun didalam Budidaya Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang budidaya perikanan mempunyai fungsi maka dalam pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, terbentuknya program dan anggaran serta bekerjasama dengan tugas menyediakan data dan informasi serta penyusunan laopran tahunan dibidang budidaya perikanan dan penyusunanana rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga melakukan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standart, prosedur serta kiteria dibidang budidaya perikanan juga memberikan bimbingan teknisdan pengawasan dengan melakukan penyuluhan.

Kemudian dalam pelaksanaan fungsinya memberikan pembinaan serta pemberian dukungan dalam administrasi dilingkungan serta dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang sudah menjadi tanggung jawab seksi budidaya perikanan dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut.

**Tabel I. 2: Standar Operasional Prosedur Program Pengembangan Dan Pengendalian Budidaya Ikan**

Keterangan								
	Kepala OPD	Kabid Perikanan	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Menugaskan Kabid Perikanan untuk menyusun Program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan	<input type="checkbox"/>					Disposisi	15 menit	Disposisi Kepala OPD
Menugaskan Kasi Perikanan Budidaya untuk menyusun program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan		<input type="checkbox"/>				Disposisi Kepala OPD	15 menit	Disposisi Kabid Perikanan
Menugaskan atau bersama pelaksana untuk menyusun						Disposisi Kabid Perikanan	15 menit	Disposisi Kepala Seksi Perikanan

1	2	3	4	5	6	7	8
program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan serta menugaskan pelaksana menetik konsep program							nan Budidaya
Menyusun program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan, lalu menetik dan mengarahkan konsep kepala kasi Perikanan Budidaya					Disposisi Kepala Seksi Perikanan Budidaya dan konsep Laporan yang akan diketik	15 menit	Konsep program yang sudah diketik
Mengoreksi konsep program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan kemudian menyerahkan kepada Kabid					Konsep Laporan yang sudah diketik	15 menit	Konsep program yang sudah dikoreksi Kasi Perikanan Budidaya
Mengorek					Konsep	15	Konse

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1	2	3	4	5	6	7	8
si konsep program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan kemudian menyerahkan kepada Kepala OPD					Laporan yang sudah dikoreksi Kasi Perikanan Budidaya	menit	p Program yang sudah dikoreksi Kabid Perikanan
Menandatangani penyusunan program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan					Konsep Laporan yang sudah dikoreksi Kabid Perikanan	15 menit	Program pengembangan dan pengendalian budidaya ikan yang sudah ditandatangani Kepala OPD

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru*

Dinas perikanan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola system pemerintah yang sudah ditetapkan oleh atasan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan guna untuk mencapai tujuan dan harus sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan

Perikanan tahun 2015-2019, oleh karena itu setiap program yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan sudah dibagi tugas-tugas kepada seksi-seksi bidang perikanan kemudian di turunkan ke masing-masing pegawai yang memegang bidangnya. Maka dari itu untuk mencapai sasaran pembangunan perikanan yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Perikanan khususnya pada Seksi Perikanan Budidaya, maka untuk pembangunana Perikanan Budidaya terdapat nomenklatur (penanaman) program dan kegiatan sebagai berikut: a) Program dan kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2. Kegiatan Pendamping Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
3. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Perikanan

Dengan demikian dapat dilihat dari ketiga kegiatan yang di program pengembangan budidaya perikanan yang sudah terealisasi dengan baik hanya pada kegiatan pembinaan pengembangan budidaya. Hal ini sebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi dengan anggaran yang senilai 736.335 untuk melaksanakan ketiga kegiatan tidak memungkinkan untuk itu kebijakan dari seksi budidaya perikanan hanya bisa melaksanakan satu kegiatan dari anggaran yang tidak mencukupi.

Kemudian pada Tahun 2019 hanya terdapat realisasi satu kegiatan dalam program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan yang dilakukan dibawah seksi budidaya perikanan dimana kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan memberikan materi kepada kelompok pembudidaya ikan.

**Tabel I. 3 : Nama-Nama Peserta Pelatihan Pembenihan Ikan**

No	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah
1.	Mina Agropuro	1 Orang
2.	Harapan Mandiri	2 Orang
3.	Projomukti Pembantuan	1 Orang
4.	Mina Melur Sejahtera	2 Orang
5.	Mina Rosela Indah	2 Orang
6.	Mina Asta Madani	2 Orang
7.	Mina Mutiara Sejahtera	2 Orang
8.	Katon Jaya	2 Orang
9.	Koperasi Bio Mina Kencana	2 Orang
10.	-	1 Orang
11.	-	1 Orang
12.	-	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>19 Orang</b>

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru,2019*

Dari tabel diatas, nama-nama pelatihan kelompok yang di undang hanya sekitar 20 oarang oleh seksi perikanan budidaya yang dipilih dari rekomendasi oleh anggota penyuluh yang mana kelompok yang mempunyai potensi atau kreteria yang sesuai syarat dan ketentuan yang dipilih oleh anggota penyuluh. Kemudian dilakukan pelatihan Budidaya ikan Untuk Pokdakan di Kecamatan tampan yang mana kelompok yang di usul dari pokok-pokok pikiran/ apirasi anggota Dewan karena dalam 1 tahun anggota harus memberikan usulan, maka terpilih lah dua puluh orang yang dalam satu kelompok sepuluh orang yang mengikuti pelatihan budidaya ikan.

**Tabel I. 4: Nama-Nama Peserta Pelatihan Budidaya Ikan untuk Pokdakan di Kecamatan Tampan**

No	Nama Pokdakan	Jumlah
1	Mina Asta Madani	10 Orang
2	Pesona Kayangan	10 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru,2019*

Selanjutnya Pelatihan budidaya Ikan lele untuk Pembudidaya Ikan di Kecamatan Rumbai Pesisir untuk memberikan materi terkait dengan tema

pembenihan dan pembudidaya pembesaran yang diusulkan atau apirasi dari anggota Dewan dengan memilihdengen jumlah 20 orang dari pembudidaya ikan yang dipilih dari masing-masing kelompok.

**Tabel I. 5: Nama-Nama Peserta Pelatihan Budidaya Lele untuk Pembudidaya Ikan di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No	Keterangan	Jumlah
1	Budidaya Pembesaran	6 Orang
1	Budidaya Pembesaran	9 Orang
2	Budidaya Pembesaran	2Orang
3	Budidaya Pembesaran	2 Orang
4	Budidaya Pembesaran	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>20 Orang</b>

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru,2019*

Selanjutna pelaksanaan kegiatan Temu Lapang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) ini berlangsung dilokasi dalam3 (tiga) kali dengan tempat yang berbeda yang dilakukan oleh seksi budidaya perikanan dalam menyampaikan materi terkait dengan tema yang ingin disampaikan. Masing-masing pokdakan yang berjumlah 20 orang dan totalnya 60 orang yang diusulkan oleh anggota penyuluh merupakan pembudidaya ikan yang bergabung dalam 10 pokdakan penerima bantuan percontohan budidaya perbesaran ikan air tawar dikolam.

**Tabel I. 6: Nama-Nama Peserta Temu Lapang Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)**

No	Nama Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN)	Jumlah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Temu Lapang 1 (Satu)</b>		
1	Pokdakan Projomukti Pebatuan	5 Orang
2	Pokdakan Mina Singgalang jaya Gemilang	5 Orang
3	Pokdakan Mina Sejahtera Mandiri	5 Orang
4	Pokdakan Indah Sari Jaya Rejosari	5 Orang
<b>Temu Lapang II (Dua)</b>		
1	Pokdakan Mina Sejahtera Raya Sakti	6 Orang
2	Pokdakan Mina Ikhlas Bersatu Air Dingin	7 Orang
3	Pokdakan Cahaya Utara Mandiri	7 Orang

1	2	3
	<b>Temu Lapang III (Tiga)</b>	
1	Pokdakan Mina Suka Damai Rumbai Pesisir	5 Orang
2	Pokdakan Mina Patin Mutiara Fajar	10 Orang
3	Pokdakan Mina Palas Bersama	5 Orang
<b>Jumlah</b>		60 Orang

*Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2019*

Pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan yang dikeluarkan dari ABPN untuk kegiatan dengan paket Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di Kolam untuk pembudidaya ikan yang dialokasikan untuk 10 (sepuluh) orang Pokdakan dengan 4 (Empat) jenis komoditas yang berbeda: (1) Nila, 2 (Dua) Pokdakan. (2) Gurami, 4 (Empat) Pokdakan. (3) Patin, 3 (Tiga) Pokdakan. (4) Lele, 1 (Satu) Pokdakan. Maka maksud dari paket pencotohan ini terdiri dari (a) Upah/biaya sampai persiapan/perbaikan kolam, (b) Alat Perikanan, (c) Benih Ikan (Nilla, Gurami, Patin, Lele). (d) Pakan Ikan.

**Tabel I. 7: Nama-Nama Pokdakan Penerima Paket Pecontohan Budidaya Ikan Air di Kolam**

No	Jabatan	Nama kelompok	Jumlah
1	2	3	4
<b>Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Percotohan Budidaya Gurami di kolam (4 Pokdakan)</b>			
1	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Indah Sari Jaya Rejosari	10 Orang
2	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Sejahtera Rejosari Mandiri	10 Orang
3	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Palas Bersama	10 Orang

1	2	3	4
4	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Suka Damai Rumbai Pesisir	10 Orang
<b>Kelompok pembudidaya Ikan (pokdakan) Penerima Paket Percontohan Budidaya Nila di Kolam ( 2 Pokdakan)</b>			
5	Ketua Sekretaris	Projomukti Pebatuan	13 Orang
	Bendahara Pengawas Anggota		
6	Ketua Skretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Sejahtera Raya Sakti	13 Orang
<b>Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Percontohan Budidaya Patin di KOLam ( 3 Pokdakan)</b>			
7	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Cahaya Utara Mandiri	11 Orang
8	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Singgalang Jaya Gemilang	10 Orang
9	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Patin Muara fajar	10 Orang
<b>Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Percontohan Budidaya Lele Di Kolam ( 1 Pokdakan)</b>			
10	Ketua Sekretaris Bendahara Pengawas Anggota	Mina Ikhlas Bersatu Air Dingin	10 Orang

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2019*

Persiapan kolam percontohan Budidaya Air Tawar Untuk 10 Pokdakan Di laksanakan secara swakelola, dimana pengerjaan perbaikan atau persiapan kolam dilaksanakan sendiri oleh kelompok, yang telah diawasi oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pekerjaan swakelola perbaikan atau persiapan kolam didasarkan pada surat perjanjian kerjasama (SPKS) antara ketua Pokdakan dengan Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen. Untuk itusebelumnya Kepala Dinas harus terlebih dahulu menunjuk/menetapkan nama-nama pokdakan penerima paket percontohan, serta nama-nama pengawas pengerjaan perbaikan/persiapan kolam dengan surat keputusan.

**Tabel I. 8: Rincian SPKS Paket Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di Kolam**

No	Nama kelompok Pembudidaya Ikan	Jumlah Hari Orang Kerja (HOK)
1	Pokdakan Projomukti pebatuan	Upah Persiapan kolam percontohan untuk Budidaya Nilla 100 OH
2	Pokdakan Mina Sejahtera Raya Sakti	Upah Persiapan kolam untuk Percontohan Budidaya Nila 100 OH
3	Pokdakan Indah Sari Jaya Rejosari	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Gurami 100 OH
4	Pokdakan Mina Sejahtera Rejosari Mandiri	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Gurami 100 OH
5	Pokdakan Mina Palas Bersama	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Gurami 100 OH
6	Pokdakan Mina Suka Damai Rumbai Pesisir	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Gurami 100 OH
7	Pokdakan Mina Sin ggalang Jaya Gemilang	Upah Persiapan Kolam Untuk Percontohan Budidaya Patin 20 OH

1	2	3
8	Pokdakan Cahaya Utara Mandiri	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Patin 100 HO
9	Pokdakan Mina Patin Muara Fajar	Upah Persiapan Kolam untuk Percontohan Budidaya Patin 100 HO
10	Pokdakan Mina Ikhlas Persatu Air Dingin	Upah Persiapan KOLam untuk Perconthan Budidaya Lele 30 HO

**Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2019**

Dengan demikian melaksanakan kegiatan Belanja Hibah atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat dengan pengadaan kolam terpal dan alat perikanan untuk percontohan budidaya ikan air tawar dikolam dengan membagi kesetiap kelompok yang penerima kolam dan terpal untuk paket percontohan Budidaya Ikan air Tawar di kolam yang dibagikan dalam jumlah 10 Pokdakan. Kemudian pengadaan benih untuk percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di kolam yang diserahkan kepada masyarakat yang tergolong dari percontohan budidaya Air Tawar yang jumlah 10 Pokdakan juga untuk pengadaan pakan Starter dan pakan Grower untuk Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar dikolam pakan diserahkan kepada masyarakat yang bagian dari paket percontohan air tawar yang jumlah 10 Pokdakan tersebut.

Pelaksanaan Sumber Dana APBN dengan memberiakan bantuan- bantuan kepada pembudidaya ikan yang diberikan setiap tahun pada tahun 2019 memberikan bantuan mesin gerakan pakan ikan lalu memberikan bantuan bahan baku pakan ikan dan juga bantuan premi asuransi yang mana pembudidayan ikan mendapatkan asuransi maka apabila ikan yang di budidayakan pembudidaya mati secara tiba-tiba disebabkan bencana yang tidak diduga-duga namun tidak hanya itu saja bantuan-bantuan bisa berupa bantuan benih ikan nila dan benih ikan patin.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sudah teralisasi dengan baik dengan berbagai kegiatan yang dilakukan yang sudah berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh penyuluh unyuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kemudian memberikan bimbingan dan materi terkait kegiatan tersebut. Hal ini dilihat yang dilakukan oleh anggota penyuluh yang ikut membantu dalam pengembangan budidaya perikanan dengan memberi bimbingan dan penyuluhan setiap harinya kepada setiap kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Hal ini dilaksanakan kepada masing-masing penyuluh yang melakukan dengan memegang masing kecamatan yang sudah di beri tugas oleh bidang penyuluh.

**Tabel I. 9: Jumlah Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan**

No	Jabatan	Jumlah Kelompok Binaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
1	Penyuluh	11 Pokdakan
2	Penyuluh	13 Pokdakan
3	Penyuluh	10 Pokdakan
4	Penyuluh	8 Pokdakan
5	Penyuluh	9 Pokdakan
6	Penyuluh	10 Pokdakan
10	Penyuluh	4 Pokdakan
11	Penyuluh	5 Pokdakan
12	Penyuluh	5 Pokdakan
<b>Jumlah</b>		<b>75 Pokdakan</b>

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2019*

Dari penejlasan diatas, bahwa dari program pengembangan budiaya perikanan sudah berjalan sedemikian namun hanya satu kegiatan saja untuk itu dua kegiatan tidak berjalan disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

Adapun ditemukan beberapa fenomena dan informasi yang penulis temukan dilapangan yang dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian ini, bahwa terdapat:

1. Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan standar dan sasaran kebijakan dilakukan beberapa kegiatan dalam program pengembangan budidaya perikanan penulis melihat dari buku Laporan Tahunan Seksi Perikanan Budidaya hanya teralisasi satu kegiatan adapun dua kegiatan tidak teralisasi atau tidak terlaksana.
2. Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru saah satu sumber daya dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan perlu sarana sementara belum tersedianya khususnya dalam Balai Benih Ikan(BBI)/Hatchery(Pemijahan) dan Kolam Percontohan

Berdasarkan fenomena diatas dalam hasil pengamatan penulis secara langsung(observasi) dans sesi tanya jawab langsung kepada staff budidaya perikanan (wawancara). Maka penulis tertarik meneliti tentang **“Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneltian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru?

2. Apakah faktor penghambat dalam Implementasi program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Implementasi program pengembangan budidaya perikanan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, yaitu diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi
2. Kegunan Akademis, yaitu sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ni.
3. Kegunaan Praktis, dapat menambah wawasan penulis dan pembaca tentang judul Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dengan berbagai penjelasan tentang permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, maka dalam hal ini penulis memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan konsep penelitian ini. diantaranya:

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasi dengan baik maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Atmosudirdjo ( Zulkifli dan Moris, 2014: 12), memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kegiatan atau energi atau hayat adalah ‘administrator’ yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri para manajer, staffer, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan ‘badan pimpinan’ dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (art) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai

suatu tujuan tertentu yang telah di tentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.

- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (administrative behavior or administration as special type of social behavior) yang merupakan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (special type of human behavior).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu. suatu tatacara yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (Skills) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihanz
- i. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya- sumberdaya menuju ketercapaian suatu prapta (objective) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (resources) dimaksud meliputi: orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machines), bahan atau peralatan (materials), metode cara teknik (methods-technology), ruang (space), tenaga atau energi (energy), dan waktu (time). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Hal ini dapat dipahami dari sejumlah definisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Bertitik tolak dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efesiensi organisasi. Aspek-aspek dimaksud meliputi:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan Keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya Manusia

Penggunaan aspek-aspek tersebut membutuhkan dan melalui metoda, teknik, pendekatan dan kiat-kiat tertentu. Oleh karena itu kepada para pelaksananya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik. Disamping itu perlu diketahui, bahwa setiap aspek tersebut tindakan berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:2) “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Pasolong (2010:3) administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut Pasolong ada tiga adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Adanya sasaran yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi public adalah untuk dimana sumber daya dan personel public diorganisasi dan dikoordinasi keputusan-keputusan dalam kebijakan public (dalam Pasolong 2010:7)

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan

efisien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

## 2. Konsep New Public Service

New public service merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi public yang berkaitan dengan pelayanan public (Pasolog,2016 : 141).

Menurut Miftah Thoha (2008) The New Public Service adalah sebuah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian tampaknya the new public service mempunyai noematif model yang bisa dibedakan dengan konsep yang lainnya. Lahirnya konsep ini tidak bias dipisahkan dengan pendahuluannya. Ide dasar konsep ini dibangun dari konsep : (1) teori democratic citizen ship, (2) model komunitas civil society, (3) organisasi humanism, (4) post modern ilmu administrasi public.

Konsep New Public Service mempunyai beberapa model yang bisa dibedakan dengan konsep lainnya. Seperti yang dikatkan Denhard&Denhardt (2007 : 549-559) bahwa prinsip-prinsip New Public Service adalah :

- a. Membantu warga masyarakat mengartikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama daripada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang baru.
- b. Administrasi public harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut dengan kepentingan public.
- c. Kebijakan dan program yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan public dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- d. Kepentingan publik lebih merupakan hail suatu dialog tentang nilai-nilai yang dietujui bersama pada agregasi kepentingan prbadi para individu.
- e. Para pelayanan public harus memebrikan perhatian, tidak semata pada dasar tetapijuga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik standart professional dan kepentingan warha masyarakat.

- f. Kepentingan public lebih baik dikembangkan oleh pelayanan-pelayanan public dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat dari pada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan memiliki mereka.

### 3. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung setiap sudut pandang sebagai wadah, proses, perilaku dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang akan hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah sertiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari segi pandangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Waldo (dalam Inu Kencana Syafii, 2003:114) organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi.

Menurut Faried Ali dan Baharudin (2014:114) organisasi sebagai salah satu inti selain manajemen dari administrasi, secara konseptual, apa yang dikonsepsikan sebagai organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dilihat dari bentuk terjadinya. Dalam suatu organisasi prinsip sangat diperlukan, terutama dapat dijadikan suatu pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan kembang. Menurut Siswanto (2005:98) ada beberapa prinsip organisasi yaitu sebagai berikut:

a. Organisasi Dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi.

b. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. individu yang akan menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

c. Tanggung jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberikan tanggung jawab juga harus diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.

d. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

e. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industry atau dunia kerja terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan adanya organisasi terciptanya keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

#### **4. Konsep Manajemen**

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Pendapat Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 5. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidaglo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa

menyederhanakan terlebih dahulu. Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.

Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- a. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- c. Penerapan sarana kputusan, menggunakan penilaian yang dimiliki oleh badan instansi tersebut sebagai bahan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh tindakan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan suatu pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

(Kansil dan cristine, 2008;190)

## **6. Konsep pengembangan**

Pengembangan adalah proses ,cara , perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang ditujuh. Pengembangan yang berarti suatu usaha yang dilakukan untuk Meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral.

Menurut Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan merupakan pendidikan berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh, sedangkan menurut Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang

menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan teorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

## 7. Konsep Sumber Daya Manusia

Manajemen memiliki beberapa unsur yaitu terdiri dari man, money, method, market, dan ilmu manajemen lah yang mengatur dari pada unsur-unsur tersebut.

Namun pada unsur man (manusia) ini unsur yang sangat penting dari pada unsur-unsur manajemen lainnya. Dan unsur man (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia atau disingkat sebagai MSDM. MSDM ini benar-benar ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu man atau manusia.

Menurut Hasibuan (2000;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. maksud dari penjelasan diatas ialah MSDM ini tujuannya untuk mengatur setiap tenaga kerja yang ada pada sebuah organisasi, yang mana bertujuan agar tercapainya hasil akhir mencapai tujuan pada organisasi tersebut, namun juga untuk membantu tujuan hidup pada tenaga kerja itu sendiri.

Manusia juga memiliki peran aktif dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia yang menjadikan perencana, pelaku dan penentu terwujudnya suatu organisasi, tujuan ini akan terwujud apabila peran manusia sebagai tenaga kerja yang ada pada organisasi tersebut baik. Dengan dikatakan demikian, karena sebaik-baiknya atau secanggih-canggihnya sebuah alat yang digunakan pada suatu organisasi tersebut. Namun jika manusia tidak bias menggerakkan dan tidak

mampu menjalankan maka tidak tercapainya apa yang diharapkan suatu organisasi tersebut. Menurut Susilo Martiyo(2000;6) mengatakan bahwa tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini terbagi ke dalam 4 poin, yaitu terdiri dari;

- a. Terwujudnya suatu organisasi yaitu untuk tercapainya efektivitas maksimal dari suatu organisasi. Dengan menggerakkan dan mengefektifkan sumber daya manusia dimasing-masing organisasi.
- b. Tujuan fungsional yaitu harus sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- c. Tujuan social yaitu setiap organisasi, apapaun tujuan harus mengingat akibatnya bagi kepentingan masyarakat umum.
- d. Tujuan personil harus kepentingan personil dalam organisasi harus diperhatikan oleh manager SDM, dan harus disinkronkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dan Ike Kusdyah Rahmawati (2008;3) mengatakan bahwa MSDM merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pngarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sangat bermanfaat karna memiliki tujuan dan fungsi dalam menjalankan manajemen tersebut. Karna manajemen sumber daya manusia selain memperhatikan kepuasan karyawannya serta memperhatikan kepuasan masyarakat akan hasil yang dicapai pada organsasi.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorgnisasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan sumber daya mansuia atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari:

- a. Rekrutmen atau penarikan sumber daya mansuia
- b. Seleksi sumber daya mansuia

- c. Pengemangan sumber daya manusia
- d. Pemeliharaan sumber daya manusia
- e. Penggunaan sumber daya manusia

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan.

## 8. Konsep Implementasi

Menurut Nugroho (2006:494) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan public, ada pun dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turuna dari kebijakan public tersebut.

Menurut mulyadi (2015 : 12), Implementasi adalah mengacu pada sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the policy implementation (1975)*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi atau implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana,

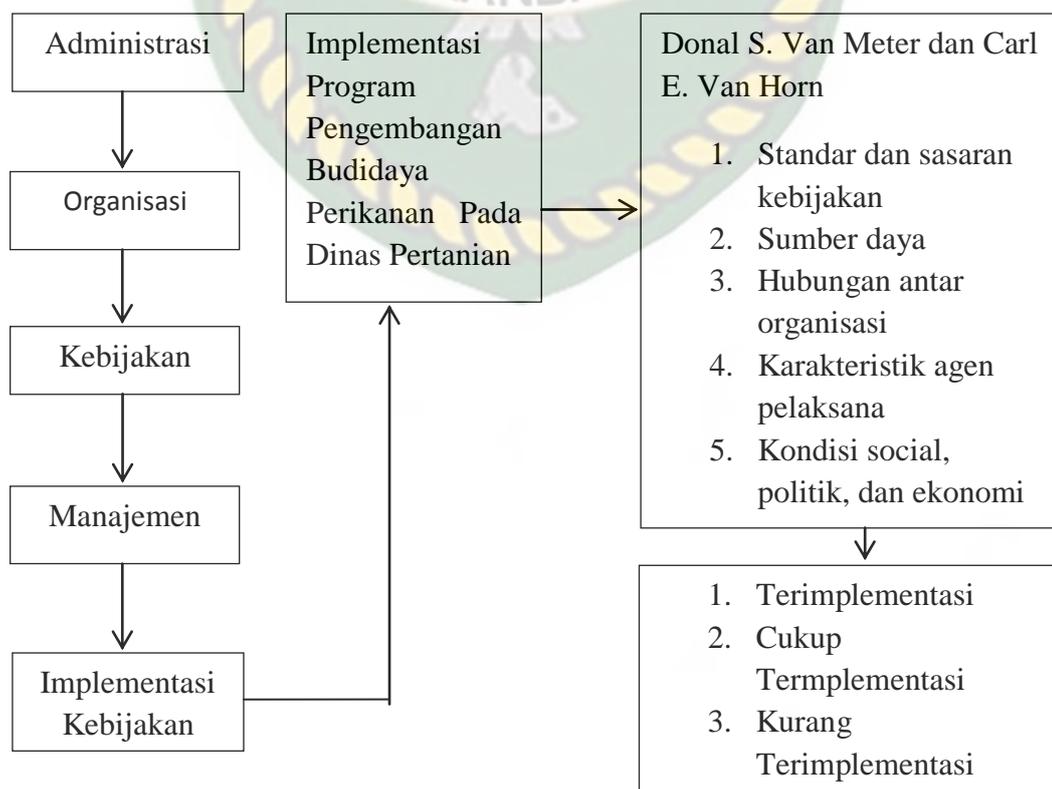
dan kebijakan kinerja public. Dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

## B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian.

**Gambar II. 1 Kerangka pemikiran peneliti tentang Implementasi Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**



*Sumber : Modifikasi Penulis,2021*

### C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait dengan skripsi ini, maka penelitian memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian.

- 1 Administrasi adalah keseluruhan proses dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2 New public service ialah memiliki pengertian bahwa pemerintah bergerak bukan layaknya sebuah bisnis, namun sebagai demokratis. Maka dari itu new public service berusaha menjadi peran pemerintah seperti tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan publik.
- 3 Organisasi adalah merupakan wadah antara dua orang atau lebih dan sekelompok orang yang berkomitmen/persetujuan dalam bekerja sama untuk bersama dalam mencapai suatu tujuan yang disepakatin bersama.
- 4 Manajemen ialah merupakan sebuah proses dengan tujuan untuk mengatur sesuatu atau sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi atau dengan sekelompok orang dengan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- 5 Sumber daya manusia adalah merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, dengan ada sumber daya manusia yang dapat mengembangkan suatu organisasi tersebut dengan satu tujuan yang telah disepakatin.

- 6 Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam melakukan tindakan atau pengambilan sebuah keputusan didalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
- 7 Implementasi adalah suatu tindakan-tindakan dalam mengambil keputusan dengan konsep kebijakan yang telah ditetapkan didalam organisasi dengan mencapai tujuan. Dipengaruhi oleh beberapa variabel (Van Meter dan Van Horn di sebut dengan A Model of the policy Implementasi, 1975) sebagai berikut :

- a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Dengan sub indikator sebagai berikut:

- a.1. Meningkatkan perekonomian

Mengelola sumber daya alam dengan baik bisa dimulai dari lingkungan sendiri. Dengan mengurangi penggunaan energy dan tidak merusak sumber daya alam yang ada di sekitar kita.

- a.2. Meningkatkan kesejahteraan

Dibentuknya POKDAKAN dapat menjadi motor penggerak tumbuhnya jiwa kewirausahaan (enterpreunership) bagi pembudidaya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha budidaya perikanan.

- a.3. Meningkatkan budidaya perikanan

Meningkatkan budidaya perikanan dapat memicu peningkatan perekonomian pembudidaya seperti taraf pendapatan yang didapat pembudidaya setiap bulannya.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan dari sumber daya baik daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Dengan sub indikator sebagai berikut:

b.1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang berperan sebagai pendukung kesuksesan perusahaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pembudidaya dilakukan secara komunal melalui kelompok-kelompok pembudidaya.

b.2. Sumber daya keuangan

Sumber daya keuangan merupakan anggaran dalam mengimplementasikan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

b.3. Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana lebih memudahkan pembudidaya dalam mengembangkan usahanya.

c. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implemtasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Dengan sub indikator sebagai berikut:

### c.1 . Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan pemerintah (Pembina) dapat meningkatkan kelancaran proses komunikasi dan pembinaan terhadap pembudidaya.

### c.2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan elemen-elemen dalam pembentukan kepribadian dan karakter seorang individu, maka diadakan pembinaan kepada POKDAKAN agar dapat memberikan dorongan dalam penumbuhan, pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

### d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjafi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dengan sub indikator sebagai berikut:

#### d.1. Berpartisipasi

Partisipasi pembudidaya, wanita pembudidaya, dan taruna pembudidaya sangat erat kaitannya dengan kesuksesan suatu organisasi. Seperti partisipasi terhadap pelaksanaan program pengembangan perikanan tangkap dan kegiatan pendamping pada kelompok pembudidaya perikanan.

#### d.2. Akuntabilitas

Keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah.

#### d.3. Responsibilitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat pembudidaya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### d.4. Efektif dan efisien

Dengan adanya POKDAKAN diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi usaha pembudidaya dengan efektif dan efisien.

#### e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Dengan sub indikator sebagai berikut:

##### e.1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses bagaimana memperkenalkan system kepada seseorang (pembudidaya). Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan.

##### e.2. Politik

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan Negara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

### e.3. Ekonomi

Untuk meningkatkan perekonomian pembudidaya maka dibentuk POKDAKAN guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pembudidaya.

#### D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel indikator, item penilaian dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan dari operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dengan mengelompokkan item penelitian yang sama sebagai variabel penelitian adalah “ Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

**Tabel II. 1: Operasional Variabel Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo,2014) implementasi	Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pada Dinas	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	a. Meningkatkan Perekonomian b. Meningkatkan Kesejahteraan c. Meningkatkan Perkembangan Budidaya Ikan	Terimplementasi Cukup Terimplmentasi Kurang Terimplemen tasi
1	2	3	4	5

<p>senagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahka pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusa kebijakan</p>	<p>Kota Pekanbaru</p>	2. Sumber Daya	<p>a. Sumber daya manusia</p> <p>b. Sumber daya keuangan</p> <p>c. Sumber daya Sarana dan prasarana</p>	<p>Terimplemen tasi Cukup Terimplemen tasi Kurang Terimplment asi</p>
		3. Hubungan Antar Organisasi	<p>a. Komunkasi</p> <p>b. Sosialisasi</p>	<p>Terimplemen tasi Cukup Terimplment asi Kurang Terimplment asi</p>
		4. Karakteristi k agen Pelaksana	<p>a. Berpartisipasi</p> <p>b. Akuntabilitas</p> <p>c. Responsibilita</p> <p>d. Efektifitas dan efisiensi</p>	<p>Terimplemen tasi Cukup Terimplment asi Kurang Terimplemen tasi</p>
		5. Kondisi Sosial, politik, dan Ekonomi	<p>a. Sosial</p> <p>b. Politik</p> <p>c. Ekonomi</p>	<p>Terimplemen tasi Cukup Terimplment asi Kurang Terimplemen tasi</p>

*Sumber: Modifikasi Penulisan, 2021*

#### E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengukuran skala Likert. Menurut Sugiyono (2014 : 132) Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang Fenomena sosial. Maka penelitian membedakan keadaan kedalam 3 (tiga kategori) yaitu: Terimplementasi 3(skor). Cukup Terimplementasi 2(skor), dan Kurang Terimplementasi 1(skor).

Adapun kategori pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator standar dan sasaran kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator standar dan telah dilakuka sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

## 2. Sumber Daya

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

## 3. Hubungan antar Organisasi

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisastelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisastelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator hubungan antar organisastelah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator karakteristik agen pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 0%-33%

#### 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kondisi sosial, politik, dan ekonomi telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 34%-66%

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil penelitian terhadap indikaot kondisi sosial, politik, dan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jawaban responden berada dalam skala 00%-33



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan tipe survey deskriptif analisis kuantitatif, tipe penelitian survey deskriptif bertujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena dengan menggunakan sejumlah sampel (Responden) kepada Pegawai bidang Budidaya perikanan dan pembudidaya dengan membagikan kuesioner pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif pengambilan data dengan angka/perhitungan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru, dalam Pengembangan Budidaya Perikanan dimana pekanbaru memiliki potensi perikanan dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> (63,226 Ha) 12 kecamatan dan 83 kelurahan dengan potensi kolam 650 Ha dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun 2019 baru mencapai 33,04% (214,76 Ha) potensi budidaya ikan keramba/jaring disungai mencapai 1.000 unit dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun 2019 baru mencapai 5,90 % (67 unit).

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unsur yang menjadikan objek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Kepala Bidang Perikanan
- b. Seksi Bidang Budidaya Perikanan
- c. Sekretaris Bidang Budidaya Perikanan
- d. Pegawai Penyuluh Perikanan

Key informan adalah Sekretaris Bidang Budidaya Perikanan dan sampel yaitu Kepala Bidang Perikanan, Seksi Bidang Budidaya Perikanan, Pegawai Penyuluh Perikanan dan sebagian dari masyarakat pembudidaya, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel.

**Tabel III. 1: Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Perentasi
1	Kepala Bidang Perikanan	1	1	100%
2	Seksi Bidang Budidaya Perikanan	1	1	100%
3	Sekretaris Bidang Budidaya Perikanan	1	1	100%
4	Pegawai Penyuluh Perikanan	5	2	40%
Jumlah		8	5	

*Sumber : Data Olahan Penulis,2021*

**Tabel III. 2: Populasi dan Sampel Pembudidaya ikan Kota Pekanbaru**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Tenayan Raya	40	3	7,5%
2	Rumbai Pesisir	30	2	6,7%
3	Rumbai	30	2	6,7%
4	Bukit Raya	25	2	8%
5	Marpoyan Damai	20	2	10%
6	Tampan	30	2	6,7%
7	Payung Sekaki	5	2	40%
8	Lima Puluh	6	2	30%
9	Sail	4	2	50%
10	Sukajadi	1	1	100%
Jumlah		191	20	10,4%

*Sumber: Data Olahan Penulis,2021*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan teknik penarikan sampel sampling jenuh, dalam hal ini teknik sampel sampling jenuh dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil dan mudah dijangkau. Penarikan sampel sampling jenuh ini dilakukan pada kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
2. Kemudian menggunakan teknik penarikan sampel purposive sampling, penentuan teknik penarikan sampel purposive sampling ini digunakan untuk masyarakat karena jumlah masyarakat yang terlalu banyak, sehingga hanya diambil dari jumlah kelompok pembudidaya masyarakat saja.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah, sebagai berikut;

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang didapatkan dengan melakukan secara langsung dari sumber-sumber yang asli dengan melakukan observasi, wawancara, dan memeberikan angket kepada responden atau objek penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang didapatkan dengan menggunakan media perantara. Data yang diperoleh juga antara lain, standar operasional prosedur, data pengguna program pengembangan budidaya perikanan dan dengan data pendukung lainnya yang diperoleh langsung kepada Dinas pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Angket atau Kuesioner**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab langsung Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru (Responden) kepada Pegawai Bidang Budidaya Perikanan dan Pembudidaya yang berkaitan dengan Pengembangan Budidaya Perikanan.

##### **2. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab lisan yang langsung berhadapan fisik atau dengan bertatap muka, teknik ini juga ditunjukkan dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Pegawai, yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

##### **3. Observasi**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berkunjung Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru tempat penelitian, melakukan pengamatan dengan melihat kondisi dilapangan tempat penelitian.

##### **4. Dokumentasi**





teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, Konsep Operasional, Hipotesis, Konsep Variabel penelitian dan Teknik Pengukuran.

### **BAB III :METODE PENELITIAN**

BAB ini terdiri dari Tipe Penelitian, lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel. Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian serta Sistematis Penulisan Skripsi.

### **BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang sejarah ringkas Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, dan Struktur Organisasi , Fungsi dan Tugas Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Informasi lainnya yang relevan terkait dengan judul penelitian.

### **BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, hasil penelitian terdiri dari identitas responden, seperti umum produktif, dan lainnya.

### **BAB VI :PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya ke dalam dua sub yaitu Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan Impelemntasi Pengembangan Budidaya Perikanan Pada

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk dengan kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pada saat ini kota pekanbaru sedang berkembang pesat jadi kota dagang dengan keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk di manfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan dari kota pekanbaru pada mulanya tidak bisa dilepaskan dari fungsi sungai siak sebagai sarana transportasi yang cukup penting dalam mendistribusikan hasil-hasil bumi dalam kawasan pedalaman dataran tinggi. Sehingga pada abad ke 18 wilayah daerah senapelan yang berada di tepi sungai siak tersebut menjadi kawasan pasar (pekan) bagi para pedagang yang berasal dari dataran tinggi.

Kota pekanbaru merupakan kota yang berkembang pesat dengan luas wilayah 63.226 ha yang terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Dengan memiliki potensi lahan yang ada dan memanfaatkan budidaya kolam 650 Ha dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun 2019 baru mencapai 214,76 Ha, potensi budidaya ikan di keramba/jaring apung di sungai dan waduk mencapai 1.000 unit dengan tingkat pemanfaatan hingga tahun 2019 baru mencapai 67 uni

## **B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Dinas Pertanian Kota Pekanbaru pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sebagaimana telah di telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang merupakan penggabungan dari 3 unit dinas dan 5 sektor, yakni: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Sedangkan subsector yang tergabung dalam wadah Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, yaitu: Subsector Tanaman Pangan dan Hortikultura, Subsector Peternakan, Subsector Perikanan, Subsector Perkebunan, dan Subsector kehutanan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 pengalihan urusan pemerintahan konkuren termasuk kehutanan dialihkan ke provinsi. Oleh karna itu, sejak tanggal tersebut subsector kehutanan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kota pekanbaru.

Selanjutnya Dinas Petaniann Kota Pekanbaru berubah namanya menjadi Dinas Pertaniann dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9). Pada Bab II Pasal 2 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pertaniann dan Perikanan

Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertaniann dan bidang perikanan.

### C. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

#### 2. Misi

**Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopeng kemandirian ekonomi dengan mengamanakan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan keperibadian indonesia sebagai negara kepulauan.

**Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

**Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujdkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

### D. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas : membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertaniann dan perikanan serta tugas pembantuan lainnya (Pasal 4 ayat 1).

Kepala Dinas Pertaniann dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perikanan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan perikanan.
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis ala lingkup tugasnya.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas : merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 5 ayat 1).

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
- b. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta penyesuaian program.

- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprtkolan.
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **3. Bidang Pertanian dan Perkebunan**

Bidang pertanian dan perkebunan mempunyai tugas : membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan seub urusan Pertaniann dan perkebunan (Pasal 9 ayat 1).

Bidang pertaniann dan perkebunan dalam melaksanka tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- b. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman

perkebunan serta pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunana.

- c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengelolaan dan pemasaran hasil pertaniann dan perkebunan.
- d. Pemantauan, pengevaluasian da pelaporan dibidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunana serta pengelolahan dan pemsaran hasil pertaniann dan perkebunan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pertaniann dan perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan.
- b. Seksi Horikultura
- c. Seksi Perkebunan.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

#### **4. Bidang Peternakan**

Bidang peternakan mempunyai tugas : membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melakasnakan sub urusan peternakan (Pasal 14 ayat 1).

Bidang peternakan dalam melaksanakan tugas sebgaiaman dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 menyelenggaakan fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peternakan.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pembinaan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis di bidang peternakan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian izin dan pembinaan usaha di bidnag peternakan.
- e. Pengkordinasian, pembinaan dan perumusan pengelohan dan pemasaran hasil peternakan.
- f. Perumusan dan penyusunan laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan di bidnag peternakan.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan , perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang peternakan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpnan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- b. Seksi Pengembangan Ternak.
- c. Seksi Pengolahan , Pemasaran dan Pasca Panen.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

## 5. Bidang Perikanan

Bidang perikanan mempunyai tugas : membantu sebagaimana tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perikanan (Pasal 19 ayat 1).

Bidang perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan beih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya., peningkatan produksi perikanan

budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- f. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kepembudidayaan.
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenalayanan.

- h. Pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenalayanan.
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan iakn dan kepembudidayaan.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kepembudidayaan.
- k. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diverifikasikan produk perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan serta peningkatan berkelanjutan usaha perikanan.
- l. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diverifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- m. Penyusunana norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diverifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan mutu dan diverifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan

dan perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diverifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistic produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- p. Pelaksanaan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.
- q. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang perikanan.
- r. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan bidang perikanan.
- s. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan.
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perikanan terdiri dari :

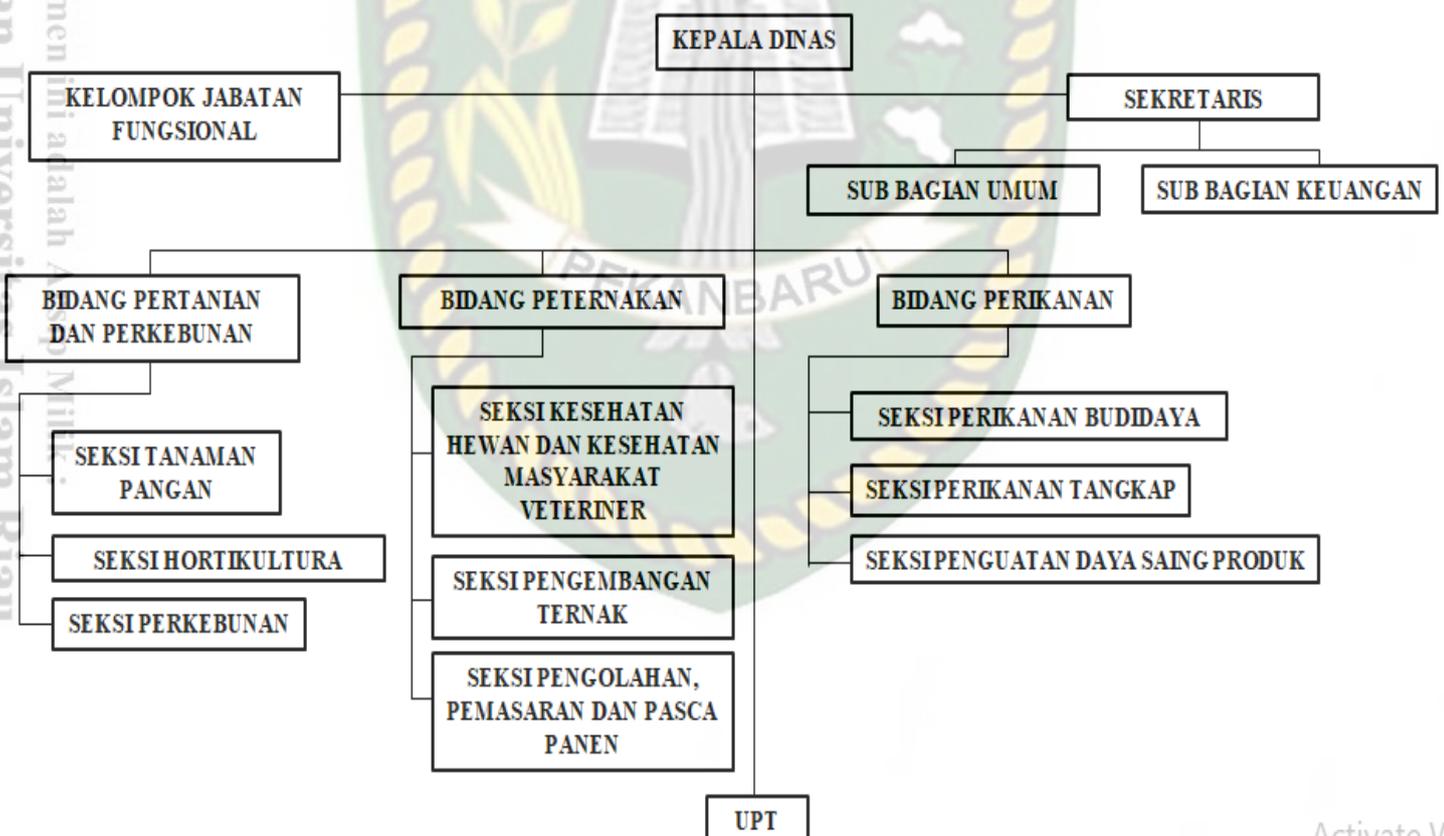
- a. Seksi Perikanan Budidaya.
- b. Seksi Budidaya ikan.
- c. Seksi Penguatan Daya Saing Produk.

Setiap seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab sub unsur perikanan budidaya (Pasal 21 ayat 1).

## E. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dalam dunia administrasi tidak lepas dari yang namanya organisasi dan manajemen. Untuk mempermudah dalam administrasi dan manajemen dalam berorganisasi, oleh karena itu maka dibentuknya sebuah struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat dilihat di bagian berikut ini :

**Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Pada Kegiatan yang dilaksanakan di Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru, penulis mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuesioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan penelitian implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru di perlukannya data atau identitas responden agar penulis dapat membagikan perkelompoknya, adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dapat dipaparkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam melakukan tindakan dan berfikir dalam melakukan sebuah pengambilan keputusan. Biasanya yang lebih tua cenderung lebih paham dalam bekerja dan berfikir lebih matang, karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam suatu kegiatan yang dilakukan sekaligus dalam pekerjaannya, untuk lebih jelasnya mengenai usia responden masyarakat pembudidaya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V. 1: Indentitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1.	20-30	0	0%
2.	31-40	3	60%
3.	41-50	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi terhadap produktivitas kerja sebab terkait dengan kemampuan fisik seorang tenaga kerja. Aparatur dinas yang produktif dalam bekerja berada pada usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun dibandingkan 41-50 tahun. Menurut Hasnah dan Widowati (2011) mengemukakan adanya pengaruh usia tenaga kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. usia yang muda mencerminkan fisik yang kuat sedangkan pada berusia yang tua produktivitasnya menurun. Semakin tinggi tingkat usia maka produktivitas akan menurun. Tenaga kerja yang memiliki usia lebih tua endrung memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini sebabkan karena pada yang berusia lebih tua sehingga kekuatan atau tenaga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas.

**Tabel V. 2: Indentitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1.	20-30	0	0%
2.	31-40	10	50%
3.	41-50	10	50%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat terhadap implementasi program pengembangan budidaya perikanan.untuk yang

berada pada usia 31-40 dan 41-50 berjumlah 10 orang. hal ini karna pada usia 31-40 dan 41-50 cenderung lebih memanfaatkan lahan dan lingkungan yang ada sehingga dapat mengembangkan suatu program yang sudah diberikan dengan tujuan merubah pola pikir dan merubah perekonomian.

## 2. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin terbagai menjadi dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin Laki-Laki dan jenis kelamin Perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi tingkatan emosional responden yang bersangkutan didalam melakukan kegiatan sekaligus didalam bekerja, untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden masyarakat pembudidaya . dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel V. 3: Identitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-Laki	2	40%
2.	Perempuan	3	60%
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2021*

Berdasarkan tabel V.3 bahwa diketahui dalam bekerja tidak hanya laki-laki namun perempuan juga dapat bekerja. hal ini sebabkan aparatur dinas memiliki 3 pegawai seksi bidang perikanan dan 2 seksi bidang perikanan. Maka baik laki-laki mau perempuan tidak masalah hanya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.

**Tabel V. 4: Identitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki-Laki	19	95%

2.	Perempuan	1	5%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2021*

Berdasarkan tabel V.4 di atas bahwa diketahui responden terhadap implementasi program pengembangan budidaya perikanan terdiri dari 19 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 1 orang dengan jenis kelamin perempuan. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa responden terdapat implementasi program pengembangan budidaya perikanan lebih dominan oleh jenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih luas dalam pola pikir dan di dalam bidang ini laki-laki lebih ke arah kemampuan dan bidangnya.

### 3. Tingkat Pendidikan

Selanjutnya dalam identitas responden pada penelitian ini terdapat juga identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V. 5: Identitas Responden Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SLTA	0	0%
2.	Sarjana (SI/S2)	5	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.5 di atas bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi bagaimana dan cara kerja aparatur dinas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai dinas maka lebih luas dalam berpola pikir juga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pembudidaya. Akan tetapi jika tingkat pendidikan semakin rendah maka kemampuan dalam berpola pikir semakin

sempit dan juga dalam memberikan pelayanan kepada pembudidaya juga semakin terbatas.

**Tabel V. 6: Identitas Responden Masyarakat Pembudidaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SLTA	20	100%
2.	Sarjana (SI/S2)	0	0%
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi sikap dan pola perilakunya. Dalam tabel diatas responden terhadap implementasi program pengembangan budidaya perikanan lebih dominan tingkat pendidikan SLTA yang berjumlah 20 orang. Hal ini dikarenakan yang ikut dalam mengembangkan budidaya perikanan tingkat pendidikan terakhir SLTA.

## **B. Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru.**

Untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru.

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang tercapai maupun tidak tercapai, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dari standard an sasaan kebijakan harus dilihat lebih spesifik sehingga untuk diakhir program tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden budidaya perikanan yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Satandar dan sasaran kebijakan yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pengembangan budidaya ikan tentang Impelementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan. untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel V. 7: Distribusi Tanggapan Responden Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Mengenai indikator Standardan Sasaran Kebijakan terhadap Impelementasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru.**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilain			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Meningkatkan Perekonomian	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
2.	Meningkatkan kesejahteraan	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5
3.	Meningkatkan Pengembangan Budidaya Ikan	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
	Jumlah	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	Rata-rata	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	Persentase	<b>53%</b>	<b>47%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.7 bahwa tanggapan responden aparatur dinas mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”

Meningkatkan Perekonomian. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan masyarakat yang mendapatkan bantuan-bantuan berupa bibit dan pakan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu para masyarakat. Dan juga dalam adanya program juga membantu dalam meningkatkan perekonomian yang dulunya lumayan sulit bagi para pembudidaya sekarang dapat pelan-pelan meningkat perubahan ekonomi mereka.

Meningkatkan Kesejahteraan. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka juga menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan mereka sudah semaksimal mungkin dalam mewujudkan dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan membuat program pengembangan budidaya perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Meningkatkan Pengembangan Budidaya perikanan. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas yang menjawab Terimplementasi, dikarenakan mereka sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan program ini dengan mengembangkan program ini, program ini dapat dikatakan berkembang mereka yang dapat memproduksi ikan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perkembangan budidaya perikanan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku sekretaris Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru. Mengenai

indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Apa saja tujuan dari dibentuknya prikanan Sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang berlaku?

Beliau Menjawab :

*“Tujuan dari program pengembangan budidaya perikanan adalah untuk memberikan dukungan, sarana, prasarana, dan sarana yang nantinya dapat memberdayakan masyarakat dan, semoga, di kemudian hari ekonomi diharapkan juga dapat meningkat.*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Diketahui dari hasil wawancara bahwa Standar dan Sasaran Kebijakan merupakan pedoman dalam menetapkan tujuan yang akurat dan jelas, salah satunya tujuan dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Pekanbaru. dengan dibentuknya tujuan dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan ini akan membantu secara bertahap dalam memberdayakan masyarakat pembudidaya dan meningkatkan taraf hidup pembudidaya dalam perekonomian.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan peneliti terhadap indikator-indikator standar dan tujuan kebijakan tersebut, masuk dalam kategori “terimplementasi”. Pertama, peningkatan ekonomi lokal merupakan perwujudan utuh yang cukup untuk meningkatkan perekonomian pembudidaya, karena masih sedikit ekonominya miskin. Kedua, kesejahteraan kelompok pembudidaya, dimana masyarakat pembudidaya membentuk kelompok pembudidaya agar selalu mendapat pembinaan dari instansi terkait.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas bahwa untuk indikator Standar dan Sasaran kebijakan berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan untuk segala bentuk bantuan pembinaan dengan tujuan Pengembangan budidaya perikanan telah dilaksanakan

sesuai ketentuan yang ada dan telah di realisasikan kepada masyarakat pembudidaya di Kota Pekanbaru yang tentunya akan berdampak kepada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut, meskipun masih belum begitu merata hal ini dikarenakan bentuk Pengembangan budidaya perikanan dilaksanakan secara bertahap tidak sekaligus.

**Tabel V. 8: Distribusi Tanggapan Responden Responden Masyarakat Pembudidaya mengenai Program Pengembangan budidaya perikanan Mengenai Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Meningkatkan Perekonomian	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	<b>20</b>
2.	Meningkatkan kesejahteraan	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	<b>20</b>
3.	Meningkatkan Pengembangan Budidaya perikanan	13 (65%)	6 (30%)	1 (5%)	<b>20</b>
	Jumlah	33	24	3	<b>60</b>
	Rata-rata	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
	Persentase	<b>55%</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat berada pada kategori “Terimplementasi”.

Meningkatkan Perekonomian. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat merasa puas terhadap program yang dibuat oleh pemerintah dan ada perubahan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai pelaku usaha.

Meningkatkan Kesejahteraan. Dilihat dari jawaban responden yang menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat yang mana adanya program yang dibuat oleh pemerintah sudah mensejahterakan masyarakatnya dengan membuka wawasan/pola pikir masyarakat secara luas dalam membudidayakan ikan dengan baik untuk di masing-masing kelompok dan memberikan bantuan-bantuan baik dalam bentuk benih dan pakan lainnya untuk menambah produksi.

Meningkatkan Pengembangan Budidaya perikanan. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat ini merasa aparaturnya sudah semaksimal dan sebaik mungkin dalam mengembangkan budidaya perikanan. Dengan memberikan bantuan 1000 benih namun terdapat peningkatan dengan memberikan 2000 benih, setiap bantuan yang diberikan adanya perubahan tahun ketahun. Maka aparaturnya membantu untuk pengembangan budidaya perikanan dibidang usaha masyarakatnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok POKDAKAN bapak Supratno. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak apakah sasaran kebijakan program pengembangan budidaya perikanan pada Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran? Beliau Menjawab :

*“saya merasa kebijakan program pengembangan budidaya perikanan pada Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran hal ini dikarenakan kegiatan tersebut memang benar adanya kami setiap tahun di undang untuk mengikuti pelatihan dengan sistem perwakilan dan kami juga sudah banyak menerima berbagai bantuan seperti benih ikan dan pakan.*

*(Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Pengembangan Budidaya Perikanan dan dibentuknya kelompok pembudidaya sehingga masyarakat pembudidaya dapat dikatakan sejahtera secara perekonomian, ini merupakan bentuk bahwa terimplementasinya Program Pengembangan budidaya perikanan telah sesuai standar dan sasaran kebijakan langsung mengarah kepada pihak pembudidaya yang dapat dirasakan secara langsung baik berupa fasilitas bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat pembudidaya dalam menjalankan program pengembangan budidaya perikanan seperti pakan, benih, terpal, bantuan modal dan pembinaan secara berkala yang dilakukan.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Standar dan Sasaran Kebijakan berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program Pengembangan Budidaya Perikanan dan dibentuknya kelompok pembudidaya. Program Pengembangan budidaya perikanan telah sesuai standar dan sasaran kebijakan langsung mengarah kepada pihak pembudidaya yang dapat dirasakan secara langsung baik berupa fasilitas bantuan sarana dan prasarana, modal serta pembinaan kepada masyarakat pembudidaya.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya menunjukkan seberapa besar dukungan dari pelaksanaan bantuan dan sumber daya manusia sekaligus sarana/prasarana untuk melaksanakan program atau kebijakan. Sumber daya juga dapat dikatakan sebagai pelaksanaan atau implementor yang diarahkan dengan memiliki keahlian

atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari sarana/prasarana maupun kekuasaan yang dapat menunjang implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden Masyarakat Pembudidaya yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Sumber Daya yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu sumber daya manusia, pelaksanaan bantuan dan sarana/prasarana. Sebagai berikut:

**Tabel V. 9: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Sumber Daya Manusia	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
2.	Sumber Daya Keuangan	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5
3.	Sarana/prasarana	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
	Jumlah	7	6	2	15
	Rata-rata	2	2	1	5
	Persentase	47%	40%	13%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat dilihat untuk tanggapan aparatur dinas untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”

Sumber daya manusia. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas sudah merasa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sumber daya manusia SDM adalah ilmu seni dan mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan 2006:1).

Sumber daya keuangan. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas mereka menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas anggaran yang tersedia belum sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh sasaran proram. Dengan keterbatasan anggaran, maka tata kelola untuk mengoptimalkan nilai manfaat anggaran dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan pembudidaya anggota POKDAKAN.

Sarana/Prasana. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi dan cukup terimplementasi, dikarenakan sarana program pengembangan budidaya perikanan dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme penganggaran APBD, dimulai dari perencanaan tingkat kecamatan hingga pengesahan APBD namun masih belum maksimal.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku sekretaris Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Apakah ibu sudah melaksanakan tugas dalam Program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Pekanbaru Sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang berlaku? Beliau

Menjawab :

*“Secara keseluruhan, sudah bisa melakukannya karena telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pusat sejak diumumkannya program politik ini. Program ini dari perspektif anggaran, regulasi, dan aplikasi lapangan. Itu baru sekitar tahun lalu dan kami menghadapi rintangan Covid 19 ini. Pelatihan tidak dapat diberikan kepada pembudidaya lain. Hal ini secara umum terlihat dari segi efisiensi dan efektifitas serta sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya terkait kebijakan dan kegiatan”*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB)*

Diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dari segi sumber daya, terutama sumber daya manusia sudah terlaksana sesuai dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) pada Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Akan tetapi terdapat kendala salah satunya karena covid-19 tidak bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelathian.

Berdasarkan observasi peneliti, indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan fakta yang terjadi dilapangan adalah komitmen dari pimpinan bagaimana Program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya.

Dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan Sumber daya yang terkandung didalamnya sebagai pelaksana atau implementor sangatlah mendukung dalam implementasi kebijakan dalam suatu program yang sedang dijalankan untuk

mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan itu sendiri tetapi masih adanya kekurangan yaitu yang terjadi dilapangan adalah dari segi sumber daya manusia tidak adanya komitmen dari atasan, tidak melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin semenjak tahun tahun sebelumnya hingga saat ini dikarenakan kendala COVID-19.

**Tabel V. 10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Sumber Daya Manusia	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	<b>20</b>
2.	Sumber Daya Keuangan	8 (40%)	10 (50%)	2 (10%)	<b>20</b>
3.	Sarana/prasarana	10 (50%)	5 (25%)	5 (25%)	<b>20</b>
	Jumlah	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>60</b>
	Rata-rata	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
	Persentase	<b>46,5%</b>	<b>38,5%</b>	<b>15%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”.

Sumber daya manusia. Dilihat dari jawaban responden masyarakat pembudidaya mereka menjawab Terimplementasi, karena masyarakat pembudidaya menilai bahwa pegawai Pengembangan Budidaya Perikanan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Sumber daya keuangan. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat pembudidaya menilai dalam efisiensi keuangan terhadap program pengembangan budidaya perikanan kurang maksimal.

Sarana/prasarana. Dilihat dari responden masyarakat pembudidaya mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat pembudidaya melihat sarana/prasarana sudah berjalan dengan baik, dalam menciptakan program pengembangan budidaya perikanan yang baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok POKDAKAN bapak Supratno. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak apakah Sumber Daya terhadap Implementasi Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah memadai? Beliau Menjawab :

*“Menurut kami sebagai kelompok pembudidaya sudah cukup terimplementasi, karena pada pelaksanaan program ini para pegawainya sudah cukup mahir ramah dan pola komunikasinya sanga baik kepada kami, dan untuk bantuan modal juga ada bagi para pembudi daya meskipun tidak semuanya dapat”*

*(Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa untuk indikator Sumber Daya berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan terkhususnya pada sumber daya manusia fakta yang terjadi dilapangan adalah komitmen penuh dari pimpinan, karena komitmen dari pimpinan sangat diperlukan untuk keberhasilan Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan. Hasil yang ditimbulkan dari komitmen dari

pimpinan salah satunya adalah adanya kejelasan mengenai standar dalam Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan .

Dengan demikian hasil penyebaran kuesioner, observasi bahwa indikator Sumber Daya berada pada Kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan tidak adanya keselarasan antara pembudidaya dan pelaksana dinas terkait dalam Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan sehingga setiap bagian didalam dinas terkait melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana mestinya dan hal tersebut langsung dirasakan oleh pihak pembudidaya secara nyata.

### **3. Hubungan Antar Organisasi**

Hubungan antar organisasi adalah sebuah usaha untuk menjalankan suatu program agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan hubungan antar organisasi ini bias dikatakan sebagai salah satu keberhasilan dari suatu program dengan adanya dukungan komunikasi dan sosialisasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Hubungan Antar Organisasi yang terdiri dari dua item penilaian yaitu komunikasi dan sosialisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V. 11: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Komunikasi	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	<b>5</b>
2.	Sosialisasi	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	<b>5</b>
	Jumlah	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
	Rata-rata	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	Persentase	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat dilihat untuk tanggapan Aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplemntasi”

Komunikasi. Dilihat dari jawaban aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan mereka merasa bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan sangat baik, segala informasi yang berkaitan dengan Pengembangan Budidaya Perikanan dan yang lainnya mereka mendapatkan informasinya.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan sebelum dilaksanakan kegiatan pada program pengembangan budidaya perikanan akan terlebih dahulu disosialisasikan dan melihat kondisi pembudidaya, dilaksanakan melalui perwakilan anggota kelompok, bimbingan teknis dari dinas dan penyuluh ke kelompok pembudidaya Perikanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku sekretaris Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Pekanbaru mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi dengan pertanyaan Bagaimana menurut ibu hubungan antar organisasi dalam Program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru? Apakah ada hambatan? Beliau menjawab :

*“setiap melaksanakan kegiatan kami selalu berdasarkan SOP yang jelas, Kementerian Pertanian, Perikanan Pekanbaru merupakan afiliasi, sehingga setiap kali ada kebijakan atau program nasional, kami yang terdepan dalam pelaksanaannya. Ini dengan komunitas pembudidaya. Dan terkait Hubungan Antar Organisasi, jelas terlihat, pertama, anggaran yang diberikan tidak sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat, dan kedua, komitmen pimpinan belum sepenuhnya dijalankan.*

*(Wawancara : Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB)*

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hubungan Antar Organisasi secara keseluruhan sudah optimal karena namun masih adanya beberapa hambatan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “ Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan komunikasi di beberapa organisasi perangkat daerah lain sudah cukup baik, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat pembudidaya.

Dapat dilihat dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan komunikasi antar organisasi perangkat daerah lain sudah baik meskipun untuk saat ini kegiatan sosialisasi ditidakan karena COVID namun hal tersebut tidak menghambat jalannya program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru hal ini juga disebabkan karena komitmen penuh dari atasan sehingga segala upaya dilaksanakan agar program ini berjalan dengan baik.

**Tabel V. 12: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Komunikasi	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	<b>20</b>
2.	Sosialisasi	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	<b>20</b>
	Jumlah	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
	Rata-rata	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	Persentase	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel V. 12 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden masyarakat pembudidaya mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi”.

Komunikasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat nekayan mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat pembudidaya ini merasa komunikasi dengan pihak terkait masih terus berlanjut hingga saat ini.

Sosialisasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat mereka menjawab Terimplementasi, dikarenakan seluruh masyarakat pembudidaya ini mendapatkan sosialisasi baik berupa informasi, tatacara, dan pembinaan publik terkait program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok POKDAKAN bapak Supratno. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut bapak hubungan antar

organisasi dalam Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru?? Beliau Menjawab :

*“Koordinasinya sudah cukup baik, kami saring bertanya kepada pegawai dinas mengenai info terbaru dan program program baru mengenai bantuan untuk pembudidaya” (Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa mengenai indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada Kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan maksimalnya komunikasi sesama Organisasi Perangkat Daerah terkait dan juga masyarakat pembudidaya sehingga komunikasi dengan pihak terkait masih terus berlanjut hingga saat ini, Sosialisasi yang baik dilaksanakan membuat optimalnya informasi yang diperoleh oleh aparatur dinas dan masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Hubungan Antar Organisasi berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan pegawai-pegawai yang berada di Organisasi Perangkat Daerah terus berupaya bekerja secara maksimal sesuai tupoksi yang ada, sedangkan untuk sosialisasi terus dilaksanakan meskipun sosialisasi secara pertemuan tatap muka ditiadakan. Jika komunikasi dan sosialisasi ini berjalan dengan baik dan semestinya pasti program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru akan maksimal.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana adalah pelaksana mengimplementasikan kebijakan dan menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi

tersebut, nilai-nilai yang berkembang, serta hubungan-hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Karakteristik agen pelaksana juga mencakup pada norma-norma, struktur birokrasi, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator Karakteristik Agen Pelaksana yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu Berpartisipasi, Berakuntabilitas, Responsibilitas, efektif dan efisien. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V. 13: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Berpartisipasi	2 (40%)	1 (20%)	2 (40%)	5
2.	Berakuntabilitas	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
3.	Responsibilitas, efektif dan efisien	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
	Jumlah	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
	Rata-rata	<b>3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>5</b>
	Persentase	<b>60%</b>	<b>26,7%</b>	<b>13,3%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.13 diatas jawaban responden aparatur dinas mengenai indikator Karakteristik agen pelaksana berada pada kategori "Terimplementasi".

Kompetensi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi dan kurang terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas merasa sudah menjalankan tugasnya sesuai dan sudah kompetensi. Dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Kurang Terimplementasi, dikarenakan sudah

menjalankan tugas sesuai dan sudah kompetensi tetapi hasil yang didapat belum maksimal.

Berakuntabilitas. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah terbuka dalam memberikan informasi publik.

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah memberikan pembinaan, pembimbingan, bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk berpembudidaya, sesuai program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Responsibilitas, efektif dan efisien . Dilihat dari jawab responden aparatur dinas menjawab Terimplementasi, dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melaksanakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru secara cepat dan tanggap sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku sekretaris Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana dengan pertanyaan Bagaimana menurut ibu karakteristik agen pelaksana program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam membina masyarakat pembudidaya? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Beliau menjawab :

*“Umumnya baik Ciri-ciri tersebut telah dijelaskan di masa lalu terkait dengan beberapa kriteria, yang pertama jelas dalam kebijakan dan tindakan pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan komunitas akuakultur Dinas Pertanian, Perikanan dan Perikanan Kota Pekanbaru. Hasilnya pun telah dirasakan oleh masyarakat.*

*(Wawancara Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas Karakteristik Agen Pelaksana sangat berperan penting dalam melaksanakan pelayanan publik. Dari kompetensi, berakuntabilitas, akuntabilitas, berpartisipasi, dan Responsibilitas, efektif dan efisien adalah karakteristik yang memang harus dimiliki oleh aparatur dinas atau pelaksana pelayanan publik, dengan ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dan sehat terutama dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan kompetensi yang baik dalam memproses informasi publik yang diberikan atau berakuntabilitas dalam membrikan informasi publik, sudah sepenuhnya mampu menangani membantu masalah yang dihadapi masyarakat pembudidaya selama ini.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Terimplemntasi”. Hal ini dikarenakan yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan aparatur dinas pelaksanaan tugasnya dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Maka dari itu sangat perlunya kompetensi, berakuntabilitas, akuntabilitas, berpartisipasi dan Responsibilitas, efektif dan efisien

yang harus dimiliki oleh pelaksana program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

**Tabel V. 14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Berpartisipasi	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	20
2.	Berakuntabilitas	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	20
3.	Respobilitas, efektif dan efisien	9 (45%)	10 (50%)	1 (5%)	20
	Jumlah	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>60</b>
	Rata-rata	<b>9,7</b>	<b>10</b>	<b>0,3</b>	<b>20</b>
	Persentase	<b>48,3%</b>	<b>50%</b>	<b>1,7%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berpartisipasi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai aparatur dinas sudah berpartisipasi dalam terlaksananya program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Berakuntabilitas. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah memberikan informasi publik secara terbuka.

Responsibilitas, efektif dan efisien . Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai aparaturnya belum cepat dan tanggap dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok POKDAKAN bapak Supratno. Mengenai indikator Standard dan Sasaran Kebijakan dengan pertanyaan. Bagaimana menurut bapak apakah dalam melaksanakan Program Pengembangan Budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru para pegawainya sudah berpartisipasi, transparan dan responsif?? Beliau Menjawab :

*“kalau menurut kami sudah hal ini para pegawai ikut turun kelapangan membantu kami bahkan kami juga mendapat berbagai pelatihan pengembangan tidak hanya budidaya perikanan konsumsi juga ikan hias” (Wawancara : Rabu 24 Maret 2021, 11.45 WIB).*

Kemudian berdasarkan observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan kompetensi dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, minimnya informasi publik yang diberikan atau kurang transparan dalam memberikan informasi publik, masih belum sepenuhnya mampu menangani aspirasi masyarakat.

Dari hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Karakteristik Agen Pelaksana berada pada Kategori “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai partisipasi, transparansi informasi dan pelayanan dalam program Pengembangan budidaya perikanan

Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana tapi belum maksimal.

### 5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam rana implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan program dalam implementasi, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi yang terdiri dari tiga item penilaian yaitu Sosial, Politik dan Ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V. 15: Distribusi Tanggapan Responden Aparatur Dinas Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Sosial	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5
2.	Politik	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5
3.	Ekonomi	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	5
	Jumlah	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
	Rata-rata	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>5</b>
	Persentase	<b>60%</b>	<b>33%</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.15 dapat dilihat bahwa rata-rata tanggapan responden aparatur dinas berada pada kategori “Terimplementasi”.

Sosial. Dilihat dari jawaban responden aparaturn dinas Terimplementasidan Cukup Terimplementasi, dikarenakan aparaturn dinas menilai dengan adanya masyarakat menilai berpartisipasi dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat merubah keadaan sosial menjadi lebih baik dan lebih terarah.

Politik. Dilihat dari jawaban aparaturn dinas Terimplementasi, dikarenakan aparaturn dinas sudah maksimal yang terjadi dalam perubhan kondisi sosial yang lebih baik.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban aparaturn dinas Terimplementasi, dikarenakan dilihat dari kondisi sebenarnya, program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam membantu keadaan ekonimi masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wahyu selaku sekretaris Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dengan pertanyaan Bagaimana menurut bapak kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dalam implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Kepada masyarakat? Apakah dapat membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi? Beliau menjawab :

*“Secara umum dari segi ekonomi, jelas bahwa program pengembangan budidaya perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru secara otomatis akan menimbulkan harapan bagi masyarakat, budidaya dan akan menciptakan harapan bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan tambak dan pemberian bibit kepada petani. Respon langsung, pelacakan instan, rute langsung dianggarkan dalam Program Pengembangan Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, layanan otomatis yang menyediakan informasi yang disediakan oleh*

*pemerintah. Dan dari segi politik, jelas bahwa kami adalah pelaksana program pengembangan budidaya perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Dan itulah yang harus kita putuskan. Program pengembangan budidaya perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdampak positif.*

*” (Wawancara Selasa 23 Maret 2021, 11.45 WIB)*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa jika program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik dan semestinya dapat membantu dalam perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dikarenakan jika tidak adanya terkendala COVID-19 maka hasil dari implementasi dari program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sangat jelas dan nyata.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai indikator Kondisi Soisal, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “ Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan terlihat bahwa program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum maksiamal dalam memberikan pelayanan, karena masih terdapat masyarakat belum dampaknya secara langsung.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan komitmen pemimpin dalam implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru namun masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota dikarenakan kendala COVID-19.

**Tabel V. 16: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Pembudidaya Mengenai indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi terhadap Implementasi Program Pengembangan budidaya perikanan**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimpleme ntasi	Cukup Terimpleme ntasi	Kurang Terimpleme ntasi	
1.	Sosial	10 (50%)	9 (45%)	1 (5%)	20
2.	Politik	10 (50%)	5 (25%)	5 (25%)	20
3.	Ekonomi	10 (50%)	10 (50%)	0 (0%)	20
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>60</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
	<b>Persentase</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Sosial. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat dengan adanya program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru kondisi sosial menjadi lebih baik.

Politik. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru merubah kondisi politik menjadi membaik.

Ekonomi. Dilihat dari jawaban responden masyarakat menjawab Terimplementasi dan Cukup Terimplementasi, dikarenakan masyarakat menilai setelah ikut program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru kondisi ekonomi membaik.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi berada pada

kategori “Cukup Terimplemmtasi”. Hal ini dikarenakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat memberikan hasil kepada masyarakat.

### **C.Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui seluruh tanggapan responden terhadap Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Rekapitulasi ini membantu peneliti dalam menilai keseluruhan indikator yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Apakah Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel rekapitulasi berikut:

**Tabel V. 17: Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Kategori
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	(53%)	(47%)	(0%)	CT
2.	Sumber Daya	(47%)	(40%)	(13%)	CT
3.	Hubungan Antar Organisasi	(50%)	(50%)	(30%)	CT
4.	Karakteristik agen pelaksana	(60%)	(26,7%)	(13.3%)	CT
5.	Kondisi Sosial ekonomi dan Politik	(60%)	(33%)	(7%)	CT
	Persentase	57%	40%	3%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tabel V.17 diatas rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada aparatur dinas, mereka menjawab rata-rata berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, masih sedikit belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Indikator Sumber Daya, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan program Pengembangan

budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat pembudidaya pada program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, berakuntabilitas, akuntabilitas, berpartisipasi dan Responibilitas, efektif dan efisien. Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana.

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur menilai hasil yang maksimal dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program

Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana namun belum semestinya.

**Tabel V. 18: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Kategori
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	(55%)	(40%)	(5%)	CT
2.	Sumber Daya	(46,5%)	(38,5%)	(15%)	CT
3.	Hubungan Antar Organisasi	(50%)	(50%)	(%)	CT
4.	Karakteristik agen pelaksana	(48,3%)	(50%)	(1,7%)	CT
5.	Kondisi Sosial dan ekonomi dan Politik	(50%)	(40%)	(10%)	CT
	Persentase	53%	40%	7%	100%

Sumber: Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari hasil tabel V.18 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden masyarakat, yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden masyarakat berada pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan dampak yang nyata setelah mengikuti program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Sumber Daya dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab ” Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa bahwa aparaturnya program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum memproses aspirasi secara maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya memberikan kemudahan dari segi waktu, efisiensi anggaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat pembudidaya pada program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan aparaturnya yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan pada program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan masyarakat melihat kurang maksimalnya perubahan pada kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi masyarakat bahwa

Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Cukup Terimplementasi”. Karena dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik.

#### **D. Faktor penghambat Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana dan prasaran produksi seperti BBI/Hatchery yang juga berfungsi sebagai sarana transfer teknologi kepada pembudidaya.
2. Masih sangat kurangnya pemahaman para pembudidaya perikanan akan manfaat kelompok.
3. Masih terbatasnya anggaran operasional monitoring, evaluasi dan pembinaan/bimbingan teknis ke lapangan.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penlit dan analisis yang penulis lakukan, banyak yang peneliti temui berdasarkan lima indikator yaitu, Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Maka dari itu penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Standar dan Sasaran kebijakan, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksmimal, masih sedikit belum sesuai dengan tujuan dari dilaksankan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
2. Indikator Sumber Daya, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan mereka menilai sudah menjalankan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran.
3. Indikator Hubungan Antar Organisasi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan hubungan antar organiasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat pembudidaya pada program

Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik.

4. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, berakuntabilitas, akuntabilitas, berpartisipasi dan Responsibilitas, efektif dan efisien . Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana.
5. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mereka menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparatur menilai hasil yang maksimal dalam program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu “Cukup Terimplementasi”. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat,

hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan budidaya perikanan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana produksi seperti BBI/Hatchery (pemijahan), kepada pembudidaya perikanan di Kota Pekanbaru.
2. Kepada dinas pertanian dan perikanan agar setelah program dilaksanakan tetap dilaksanakan pengawasan yang berkelanjutan dan diadakannya tempat pemasaran ikan budidaya oleh dinas terkait.
3. Dikarenakan pemberian bantuan bibit ikan kepada pembudidaya belum merata, kepadadinas pertanian dan perikanan diharapkan dapat melakukan sebuah inovasi seperti pengurangan bibit bantuan kepada persetiap pembudi daya penerima bantuan sehingga bibit ikan dapat di bagikan secara merata kepada pembudidaya lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2011). *Ekonomi-Politik Formulasi kebijakan Dalam Konteks Yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Denhart and Denhart. (2007). *The New Public Service*. Armonk New York: Expanded addition.
- Denhart, J. V and R. B Denhardt. *The New publik Service: Serving not Stering*. *Publik Adminitration*, Now/Dec, 60,6, 549-559,2000.
- Duun, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gada Mada Universitas Press.
- Ali, faried.(2014). *Ilmu Administrasi dakam pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- George, R Terry (n.d.).*Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C. d. (2008).*Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2006). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P Sondang. (2003). *Filsafat Admnistrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto, H. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana (2003).*Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Thoha, M. (2008).*Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zulkifli.(2014). *Fungsi –fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

### Dokumen

- Peraturan PerUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Buku Panduan Laporan Tahunan Seksi Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**